



RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

2026

Kunjungi Laman Kami
<https://bpkpd.natunakab.go.id/>



IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Penyusunan Renja Tahun 2026 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta adaptif terhadap dinamika kebijakan fiskal dan kondisi riil kemampuan keuangan daerah. Selain itu, dokumen ini juga merupakan respons terhadap berbagai permasalahan strategis yang masih dihadapi, seperti belum optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah, rendahnya efektivitas penerimaan pajak daerah, serta masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan capaian yang baik, dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan capaian antar program, khususnya pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan optimalisasi pendapatan daerah yang belum sepenuhnya efektif.

Renja BPKPD Tahun 2026 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta kerangka pendanaan yang terukur. Program yang dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) program utama, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Keempat program tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah, peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah, serta peningkatan efektivitas penerimaan pendapatan daerah. Dalam implementasinya, program dan kegiatan difokuskan pada penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, optimalisasi pengelolaan kas daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam konteks kebijakan nasional, Renja Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan efisiensi belanja dan penguatan tata kelola keuangan daerah berbasis sistem informasi, khususnya melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini menjadi penting dalam rangka meningkatkan akurasi data, efektivitas pengambilan keputusan, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Secara strategis, Renja BPKPD Tahun 2026 memiliki peran sebagai instrumen pengendali dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat ditentukan oleh sinergi antar perangkat daerah, penguatan sistem pengendalian internal, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Renja BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal dan konsisten.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu.

Penyusunan Renja Tahun 2026 ini merupakan bagian dari proses perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun secara sistematis sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026. Dokumen ini juga mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Renja Tahun 2026 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta kerangka pendanaan yang disusun secara terukur dan terarah. Penyusunan ini mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, proyeksi tahun berjalan, serta kebutuhan pembangunan daerah ke depan, sebagaimana tergambar dalam struktur indikator, target, dan pagu indikatif dalam dokumen Renja 2026.

Secara substansi, Renja Tahun 2026 juga mencerminkan upaya strategis Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung stabilitas fiskal daerah serta peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah sesuai dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

Selain itu, Renja ini diarahkan untuk mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, serta pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Diharapkan Renja Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD selama tahun anggaran berjalan, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan, serta diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



Ranai, 25 September 2025

SURYANTO, SE., MA
NIP. 19770912 200012 1 004

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	18
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
3.2.1 Tujuan Jangka Menengah BPKPD	30
3.2.2 Sasaran Jangka Menengah BPKPD.....	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	37
4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	37
4.2 Rincian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	38
BAB IV PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Realisasi Anggaran per Program Realisasi Anggaran per Program	8
Tabel 2. 2	Evaluasi Rencana Kerja BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	11
Tabel 2. 3	Capaian Kinerja Pelayanan BPKPD Tahun 2024	15
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2030	36
Tabel 4. 1	Renja SKPD BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara normatif, penyusunan Renja Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta mengacu pada RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026. Selain itu, Renja ini disusun dengan memperhatikan kesinambungan perencanaan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen Renstra BPKPD, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang diukur antara lain melalui indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta indikator kinerja lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Renja Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target strategis tersebut melalui program pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Rencana Kerja BPKPD Tahun 2026 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta kerangka pendanaan yang terukur. Penyusunan Renja ini didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya dan prakiraan capaian tahun berjalan, serta mempertimbangkan kebutuhan riil pembangunan daerah. Dalam dokumen Renja 2026 terlihat bahwa setiap program dan kegiatan telah disusun dengan indikator yang jelas serta dukungan pagu indikatif yang bersumber dari dana transfer dan pendapatan daerah, sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Renja Tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran

daerah, peningkatan ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan, serta optimalisasi pengelolaan kas daerah dan belanja daerah. Hal ini tercermin dalam target kinerja seperti persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen anggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta optimalisasi realisasi anggaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam Renstra BPKPD.

Selain itu, penyusunan Renja Tahun 2026 juga memperhatikan dinamika kondisi fiskal daerah, keterbatasan kapasitas keuangan daerah, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatan diarahkan pada penajaman prioritas pembangunan, efisiensi belanja daerah, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD selama Tahun Anggaran 2026, serta mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan demikian, Renja Tahun 2026 menjadi instrumen strategis dalam menjamin kesinambungan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 446).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan teknis tahunan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target capaian, serta kerangka pendanaan secara terukur, sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung tercapainya sasaran strategis pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan

optimal, sebagaimana tergambar dalam struktur kinerja dan pendanaan Renja Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterpaduan dan konsistensi perencanaan dan penganggaran, melalui penyelarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja dan pagu indikatif yang jelas;
2. Menajamkan prioritas program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, prakiraan capaian tahun berjalan, serta kemampuan keuangan daerah guna memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan tepat sasaran;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan kas dan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan;
4. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, melalui pencapaian target kinerja seperti ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta optimalisasi realisasi anggaran daerah;
5. Menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja, sehingga capaian program dan kegiatan dapat diukur secara objektif dan sistematis sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan dimaksud menjadi landasan normatif dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, sehingga proses penyusunan Renja dilaksanakan secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Renja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target capaian, serta kerangka pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat penyesuaian program, kebijakan, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan pada tahun berjalan. Perubahan Renja SKPD disusun berdasarkan Renstra serta mengacu pada Perubahan RKPD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan, dengan pagu anggaran pada APBD Murni sebesar Rp144.494.527.727,00, yang kemudian mengalami penyesuaian pada Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp155.775.978.877,00. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp142.873.711.007,00 atau sebesar 98,2 persen. Untuk memberikan gambaran capaian program, disajikan tabel realisasi per program sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Realisasi Anggaran per Program Realisasi Anggaran per Program

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	18,592,265,237.00	15,902,264,392.00	85,53
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	133,452,617,620.00	125,434,106,703.00	93,99
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,856,531,070.00	1,272,189,998.00	68,53
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,680,904,950.00	1,417,399,608.00	84,32
Jumlah		155,775,978,877.00	144,209,176,750.00	92,57

Sumber: LRA BPKPD 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa capaian realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai sebesar 85,53 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya realisasi belanja yang belum dapat diselesaikan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2024 dan dicatat sebagai kewajiban (utang belanja) pada Tahun 2025.

Selanjutnya, capaian realisasi anggaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 93,99 persen, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 86,53 persen, serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 84,32 persen.

Secara keseluruhan, capaian kinerja realisasi anggaran program mencapai 92,57 persen, atau mengalami penurunan sebesar 5,63 persen (*year on year*) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari 4 (empat) program yang dilaksanakan, terdapat 3 (tiga) program yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan realisasi anggaran dari ketiga program pendukung tersebut, capaian realisasi anggaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 68,53 persen.

Berdasarkan hasil analisis, rendahnya capaian realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan dengan capaian realisasi anggaran di bawah 70 persen, yaitu:

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
2. Penilaian Barang Milik Daerah.

Pada sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, capaian realisasi anggaran sebesar 40,13 persen, yang disebabkan oleh adanya penambahan anggaran sebesar Rp17.180.000,00 yang belum dapat direalisasikan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, pada sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, capaian realisasi anggaran sebesar 39,64 persen, disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja perjalanan dinas. Dari pagu anggaran sebesar Rp103.031.010,00, realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp50.449.000,00 atau sebesar 48,96 persen. Kondisi ini sejalan dengan pelaksanaan kegiatan penilaian Barang Milik Daerah yang hanya terealisasi untuk 1 (satu) unit kendaraan dalam rangka proses pelelangan.

Selanjutnya, capaian kinerja anggaran kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Evaluasi Rencana Kerja BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi 12=8+9+10+11		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%) 13=12/7 x100		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan							
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	4A			k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	I		II		III		IV		k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp			
1	2	3												5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11										13=12/7 x100	14=8+12	15=14x100
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																	
5.02		KEUANGAN																															
5.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																															
5.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65.5	300,000,000	50	295,636,684	65.5	390,000,000	65.5	158,624,000	60	16,710,274	75.7	8,643,839	75.7	13,654,339	0	40,699,912	76	79,707,364	92.88	50.28	144.9	295,636,684	177.79	98.55					
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	100,000,000	2	193,233,077	2	190,000,000	2	102,400,000	1	15,060,274	2	6,676,839	0	11,435,839	2	25,288,511	2	58,461,463	100	57.00	4	193,233,077	200	193.23					
5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	100,000,000	7	102,403,607	4	100,000,000	4	56,124,000	0	1,650,000	1	1,967,000	2	2,218,500	1	15,410,451	3	21,245,901	75	37.80	10	102,403,607	250	102.4					
5.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	10,059,082,887	85	42,275,291,394	85	16,931,941,443	85	18,627,401,237	85	3,563,435,074	86	4,130,476,344	85	3,691,650,698	85	2,765,704,495	85	14,131,166,611	100	75.86	170	42,275,291,394	200	280.73					
5.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	11,561,182,887	1	29,635,753,900	1	11,605,841,443	1	11,224,125,681	1	2,934,935,444	1	3,100,455,365	1	2,400,543,838	1	1,968,872,177	1	10,394,806,824	100	92.61	2	29,635,753,900	200	268.07					
5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menorima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	77	11,521,541,443	85	29,635,753,900	77	11,544,841,443	77	11,224,125,681	74	2,934,935,444	75	3,100,455,365	75	2,400,543,838	75	1,968,872,177	75	10,394,806,824	97.4	92.61	160	29,635,753,900	207.79	258.96					
5.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	145,000,000	75	147,683,501	95	180,000,000	95	193,660,000	75	0	80	128,183,501	85	0	19,500,000	85	147,683,501	89.47	76.26	160	147,683,501	168.42	101.85						
5.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian	Paket	165	100,000,000	0	19,500,000	165	60,000,000	165	32,800,000	0	0	0	40	0	39	19,500,000	79	19,500,000	47.88	59.45	79	19,500,000	47.88	19.5						
5.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	45,000,000	0	128,183,501	5	120,000,000	5	160,860,000	0	0	9	128,183,501	0	0	0	9	128,183,501	180	79.69	9	128,183,501	180	284.85						
5.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	980,000,000	100	2,354,144,886	55	930,000,000	55	980,471,310	21.74	156,427,537	42.75	169,365,773	55	264,520,906	0	207,734,049	55	798,048,265	100	81.39	155	2,354,144,886	281.82	240.22					
5.02.01.2.06.03		Penyediaan Pemeliharaan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pemeliharaan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	28	162,955,050	12	60,000,000	12	64,823,800	3	0	3	36,283,500	3	0	9	56,693,300	75	85.92	37	162,955,050	308.33	271.59							
5.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	90,000,000	24	197,117,500	12	50,000,000	12	144,590,000	3	9,648,500	3	36,390,750	3	29,776,750	3	41,008,500	9	116,824,500	75	80.8	33	197,117,500	275	219.02					
5.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	80,000,000	22	281,573,000	12	50,000,000	12	95,000,000	3	12,000,000	3	19,850,000	3	23,347,500	3	6,837,500	9	62,035,000	75	65.3	31	281,573,000	258.33	351.97					
5.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	50,000,000	54	51,800,000	60	40,000,000	60	24,000,000	0	0	27	12,000,000	0	0	27	12,000,000	45	50	81	51,800,000	135	103.6							
5.02.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	90,000,000	24	290,604,400	12	80,000,000	12	90,541,200	3	26,291,000	3	23,786,600	3	22,790,900	3	12,797,000	9	85,665,500	75	94.61	33	290,604,400	275	322.89					
5.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	490,000,000	22	1,370,094,936	36	400,000,000	36	561,516,510	18	89,078,237	11	89,338,423	82	140,322,256	14	147,091,049	111	465,829,965	308.33	82.96	133	1,370,094,936	369.44	279.61					
5.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan barang milik daerah	Persen	60	180,000,000	100	672,400,750	60	940,000,000	60	1,987,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	672,400,750	166.67	373.56						
5.02.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	700,000,000	1	515,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.02.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	100,000,000	15	48,460,000	25	100,000,000	25	100,000,000	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	44	0	26	48,460,000	104	48.4					
5.02.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	24	624,000,750	4	100,000,000	4	1,402,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	624,000,750	600	3,120,000						
5.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	1,559,600,000	100	6,343,725,452	80	2,000,000,000	80	2,296,850,000	80	410,289,459	81	557,957,855	85	520,674,887	0	513,275,288	85	2,002,197,469	106.25	87.17	185	6,343,725,452	231.25	406.75					
5.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,559,600,000	24	6,343,725,452	12	2,000,000,000	12	2,296,850,000	3	410,289,459	3	557,957,855	3	520,674,887	0	513,275,288	9	2,002,197,469	75	87.17	33	6,343,725,452	275	406.75					
5.02.01.2.08.05		Penyediaan Jasa Sunat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sunat Menyurat	Laporan	12	50,000,000	24	70,357,000	12	50,000,000	12	18,260,000	3	5,940,000	3	4,405,000	3	4,565,000	3	3,025,000	9	17,985,000	75	98.49	33	70,357,000	275	140.71					
5.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	220,000,000	24	1,534,034,700	12	700,000,000	12	502,629,596	3	11,185,000	3	73,696,500	3	86,033,500	0	45,002,500	9	216,517,500	75	43.08	33	1,534,034,700	275	697.29					
5.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	90	290,000,000	100	1,317,191,205	90	450,000,000	90	1,423,904,650	85	34,667,634	86	96,362,350	88	414,612,567	0	8,295,501	88	563,928,052	97.78	38.9	188	1,317,191,205	208.89	454.2					
5.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	17	40,000,000	20	183,129,235	17	70,000,000	17	116,184,650	4	19,572,634	8	25,874,750	5	18,227,500	0	8,295,501	17	71,970,385	100	61.94	37	183,129,235	217.65	457.82					
5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	180,000,000	14	1,032,414,470	2	180,000,000	2	1,006,140,000	0	0	1	52,937,600	2	381,600,067	0	3	434,537,667	150	43.19	17	1,032,414,470	850	573.56						
5.02.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30,000,000	24	101,647,500	2	50,000,000	2	301,480,000	0	15,085,000	1	17,550,000	0	14,785,000	0	0	1	47,420,000	50	15.73	25	101,647,500	1,250.00	338.83					
5.02.02.		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persen	100	124,044,707,866	100	355,477,388,407	100	145,108,249,254	100	130,060,708,180	100	42,453,795,416	100	21,696,380,724	100	40,563,859,466	100	18,312,966,099	100	123,017,001,704	100	94.58	100	355,477,388,407	100	286.57					
5.02.02.2.02.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu	Persen	100	1,099,000,000	100	3,098,736,134	100	1,000,000,000	100	1,715,912,400	100	256,759,748	100	267,868,709	100	351,488,614	100	287,281,697	100	1,163,416,768	100	67.8	100	3,098,736,134	100	281.98					
5.02.02.2.02.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	250,000,000	51	922,044,608	1	250,000,000	1	392,268,000	1	69,794,736	1	27,802,000	1	100,110,369	1	79,368,493	1	277,075,598	100	70.63	52	922,044,608	5,000.00	368.82					
5.02.02.2.02.05		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana																														

5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alokasi Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alokasi Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alokasi Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	200,000,000	71	768,135,351	12	200,000,000	12	965,274,400	3	92,390,712	3	134,920,909	3	115,801,493	3	99,298,122	12	442,411,236	100	78.26	83	768,135,351	691.67	384.07	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	Persen	92	811,200,000	100	2,639,785,903	92	1,131,700,000	92	1,310,507,880	92	214,389,501	95	264,441,839	95	330,196,430	95	116,035,136	95	924,062,910	103.26	70.51	95	2,639,785,903	103.26	313.09	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	12	140,000,000	7	847,079,824	12	234,500,000	12	416,562,000	3	53,903,700	3	49,641,689	3	48,681,490	3	34,247,000	12	186,473,879	100	44.76	19	847,079,824	158.33	605.06	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Diben	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Diben	Dokumen	12	70,000,000	7	129,067,800	12	70,000,000	12	97,041,000	3	6,029,000	3	12,831,800	3	58,953,000	3	15,340,000	9	93,153,800	75	95.99	16	129,067,800	133.33	184.38	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	12	181,200,000	18	716,116,789	12	181,200,000	12	167,418,380	3	20,165,000	3	36,580,000	3	39,314,078	3	31,850,000	9	127,898,078	75	76.39	27	716,116,789	225	395.21	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	12	50,000,000	21	392,143,986	12	250,000,000	12	319,065,180	3	129,278,301	3	111,476,800	3	48,526,978	3	0	9	286,281,879	75	80.73	30	392,143,986	250	794.29	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	50,000,000	3	308,590,741	2	80,000,000	2	135,187,480	0	0	2	44,108,000	0	70,937,675	0	13,988,136	2	128,733,811	100	95.23	5	308,590,741	250	617.18	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	100,000,000	1	69,791,249	1	100,000,000	1	105,020,000	0	2,335,750	1	0	0	28,024,799	0	5,688,000	1	36,048,549	100	34.33	2	69,791,249	200	69.79	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	50,000,000	1	44,529,600	1	50,000,000	1	35,963,000	0	2,636,250	1	8,898,750	0	10,642,000	0	10,830,000	1	33,007,000	100	91.78	2	44,529,600	200	89.06	Laporan dibuat setiap bulan
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota	Laporan	1	40,000,000	1	32,465,914	1	46,000,000	1	34,250,840	1	3,041,500	1	925,000	1	25,116,414	1	3,383,000	1	32,465,914	100	94.79	2	32,465,914	200	81.16	Laporan dibuat setiap bulan
5.02.02.2.04	Pemungutan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Persen	10	122,134,507,806	50	349,838,867,370	10	142,977,549,254	10	127,034,288,900	10	41,982,646,167	10	21,164,052,176	10	39,872,174,417	10	17,910,649,286	9	120,929,522,026	90	95.19	59	349,838,867,370	590	286.44	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	4	111,313,807,806	2	337,961,037,400	4	132,506,849,254	4	117,001,391,500	1	41,967,723,025	1	18,420,823,175	1	39,395,505,575	1	17,763,880,225	1	117,547,942,000	25	99.95	3	337,961,037,400	75	303.61	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	9,500,000,000	2	3,645,123,521	1	9,100,000,000	1	4,000,000,000	1	14,923,142	1	26,780,492	1	476,668,842	1	146,759,041	1	865,131,517	100	16.63	3	3,645,123,521	300	38.97	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	4	1,250,700,000	2	8,232,706,449	4	1,250,700,000	4	5,432,897,000	1	0	1	2,716,448,509	1	0	1	0	1	2,716,448,509	25	50	3	8,232,706,449	75	658.25	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi	Persen	94	2,540,000,000	100	5,689,197,459	94	2,420,000,000	94	3,391,908,440	100	129,931,007	100	538,031,599	100	642,476,056	100	246,458,488	100	1,556,897,150	106.38	45.9	100	5,689,197,459	106.38	223.98	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu	1	2,540,000,000	1	5,689,197,459	1	2,420,000,000	1	3,391,908,440	1	129,931,007	1	538,031,599	1	642,476,056	1	246,458,488	1	1,556,897,150	100	45.9	1	5,689,197,459	100	223.98	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	1,200,000,000	9	1,573,128,377	1	1,100,000,000	1	1,039,852,270	1	9,456,800	1	24,546,900	1	145,963,101	1	20,798,314	1	200,705,115	100	19.31	10	1,573,128,377	1,000.00	131.09	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1	700,000,000	2	1,992,546,948	1	700,000,000	1	796,252,730	1	7,527,000	1	25,745,487	1	324,005,661	1	0	1	589,600,148	100	73.98	3	1,992,546,948	300	284.65	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	10	300,000,000	44	2,123,522,134	10	300,000,000	10	1,555,763,440	3	112,947,207	3	256,027,212	2	172,417,294	2	225,660,174	3	767,051,897	30	49.3	47	2,123,522,134	470	707.84	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILK DAERAH	Manajemen Aset	Persen	83	2,029,590,000	318	3,428,833,706	83	2,264,590,000	83	1,856,531,070	318	235,071,980	318	261,835,910	60	427,334,554	0	232,585,680	50	1,156,628,124	60.24	62.3	81.8	3,428,833,706	98.55	168.94	Berkas perhitungannya SKM atau equivalent
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milk Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBM	Persen	100	840,000,000	40	586,921,958	100	800,000,000	100	333,866,570	100	65,607,780	100	35,106,600	100	82,273,800	100	50,915,000	100	233,003,180	100	69.79	100	586,921,958	100	69.87	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	300,000,000	2	462,000,380	1	300,000,000	1	265,518,380	3	52,662,980	0	26,498,600	0	78,956,100	0	40,000,000	3	198,117,680	300	74.62	3	462,000,380	300	154	Dokumen SKH yang disusun sebanyak 3 Bab, dan 100 Dik. RKBM Pemeliharaan dan Inovasi.
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah	Dokumen	2	200,000,000	2	124,921,578	2	200,000,000	2	68,368,190	0	12,944,800	2	8,608,000	0	3,317,700	0	10,015,000	2	34,885,500	100	51.03	2	124,921,578	100	62.46	
5.02.03.2.01.04	Pengelolaan Barang Milk Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milk Daerah	Persen	77	1,189,590,000	40	2,841,911,748	77	1,464,590,000	77	1,522,644,500	0	169,464,200	0	226,529,310	0	345,060,754	74.47	182,570,680	74	923,624,944	96.71	60.66	114.47	2,841,911,748	148.66	238.9	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (I.HI) Barang Milk Daerah	Laporan	1	300,000,000	1	58,633,500	1	300,000,000	1	85,182,670	0	0	0	6,866,300	0	1,822,300	1	12,712,000	1	21,300,300	100	25.01	2	58,633,500	200	19.54	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milk Daerah	Laporan	1	150,000,000	2	1,312,487,043	1	475,000,000	1	398,330,120	0	19,535,500	0	67,770,008	0	133,533,814	1	61,839,480	1	282,678,602	100	70.97	3	1,312,487,043	300	874.99	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah	Laporan	1	180,000,000	2	240,328,500	1	150,000,000	1	171,400,000	0	0	0	4,200,000	1	13,746,200	0	50,000,000	1	67,946,200	100	39.64	3	240,328,500	300	133.52	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	Laporan	1	49,590,000	1	377,395,100	1	49,590,000	1	311,335,610	0	42,503,000	0	56,315,000	0	60,634,800	1	17,971,600	1	177,424,400	100	56.99	2	377,395,100	200	761.03	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Dokumen	1	200,000,000	2	324,504,209	1	200,000,000	1	162,886,980	1	14,145,200	1	25,990,000	1	58,249,140	2	24,981,600	5	124,365,940	500	76.35	7	324,504,209	700	162.25	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	Laporan	4	200,000,000	2	528,563,396	4	180,000,000	4	393,509,140	3	93,280,500	3	65,588,002	3	75,975,000	3	15,066,000	12	249,909,502	300	63.51	14	528,563,396	350	264.28	Laporan dibuat setiap bulan

5.02.04.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	5	385,000,000	9.32	2,017,293,755	5	636,000,000	5	1,680,904,950	0.81	57,563,900	3	613,082,763	0	217,912,359	7	264,764,875	7	1,053,313,897	140	62.66	7	2,017,293,755	140	523.97	Objek pajak MBEI yang telah terakumulasi hingga 23,50%, hal ini diantisipasi	
5.02.04.2.01.		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persen	6	385,000,000	86	2,017,293,755	6	636,000,000	6	1,680,904,950	4.66	57,563,900	17.95	613,082,763	30.82	217,912,359	47.32	264,764,875	47	1,053,313,897	788.67	62.66	47.32	2,017,293,755	788.67	523.97	Adaptasi sistem aplikasi berbasis IT, INOVASI, seperti tools dalam penganggaran pajak dan updatenya permutasi ke dalam data Cetak	
5.02.04.2.01.03.		Ponyuluhan dan Penyoberluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Ponyuluhan dan Penyoberluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	37,400,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	1	0	100	100	100	Sudah dilaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah pada tanggal 17 Desember 2024 di Achuan Jala Subuk, dengan peserta sosialisasi sebanyak 100
5.02.04.2.01.05.		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1365	20,000,000	710	1,181,111,486	1365	20,000,000	1365	1,024,886,950	342	50,213,900	663	390,695,163	445	155,694,559	437	191,037,814	1,907	787,741,436	136.71	76.86	2617	1,181,111,486	191.72	5,905.56	Pendataan, pemutakhiran data dan pengisian administrasi data jumlah kendaraan Pajak yang diharapkan kepada Wajib Pajak.	
5.02.04.2.01.08.		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	Dokumen	44699	25,000,000	48175	836,182,269	44699	25,000,000	44699	618,618,000	44699	7,350,000	44699	122,287,600	44699	62,217,800	44699	73,717,061	44,699	265,572,461	100	42.93	90874	836,182,269	207.78	3,344.73		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 secara umum menunjukkan capaian yang relatif baik, ditunjukkan dengan dominannya realisasi anggaran pada sebagian besar program yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama. Dari 4 (empat) program yang dilaksanakan, terdapat 3 (tiga) program yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian kinerja utama, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan realisasi anggaran pada ketiga program pendukung tersebut, capaian realisasi anggaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 68,53 persen.

Berdasarkan hasil analisis, rendahnya capaian realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan dengan capaian realisasi anggaran di bawah 70 persen, yaitu:

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
2. Penilaian Barang Milik Daerah.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan, khususnya Inventarisasi Barang Milik Daerah dan Penilaian Barang Milik Daerah. Pada sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, capaian realisasi anggaran sebesar 40,13 persen disebabkan adanya penambahan anggaran yang belum dapat direalisasikan pembayarannya pada tahun berjalan dan menjadi kewajiban pada tahun berikutnya. Sementara itu, pada sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, capaian realisasi sebesar 39,64 persen dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja perjalanan dinas, yang berimplikasi pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan penilaian aset, dimana realisasi hanya mencakup 1 (satu) unit kendaraan untuk proses pelelangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara perencanaan kegiatan, pelaksanaan anggaran, serta efektivitas output kegiatan yang belum sepenuhnya selaras. Selain itu, faktor perencanaan yang kurang adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan serta keterbatasan pelaksanaan kegiatan teknis juga menjadi penyebab belum optimalnya capaian program. Rincian apaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Pelayanan BPKPD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis, Indikator dan Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator
		Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel					
I	Opini Laporan Keuangan				WTP
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	133,452,617,620.00	125,434,106,703.00	93.99	
	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3,391,908,440.00	1,913,436,205.00	56.41	
	2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,715,912,400.00	1,411,710,068.00	82.27	
	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,310,507,880.00	1,179,438,413.00	90.00	
	4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	127,034,288,900.00	120,929,522,017.00	95.19	
II	Rasio Pengelolaan BMD				87,62%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,856,531,070.00	1,272,189,998.00	68.53	
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,856,531,070.00	1,272,189,998.00	68.53	
III	Rasio Efektifitas Pajak Daerah				69,36%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,680,904,950.00	1,417,399,608.00	84.32	
	1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1,680,904,950.00	1,417,399,608.00	84.32	
	JUMLAH	137,183,713,640.00	128,306,912,358.00	98,6	

Sumber: LRA BPKPD 2024

Dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dengan Bupati, telah dialokasikan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp137.183.713.640,00 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Dari alokasi tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp128.306.912.358,00 atau sebesar 93,53 persen, yang menunjukkan

tingkat serapan anggaran yang relatif tinggi dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan secara umum.

Namun demikian, capaian kinerja tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari pencapaian indikator kinerja yang mendukung IKU. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator dimaksud, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Opini Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2024 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Natuna memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar akuntansi pemerintahan serta efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga indikator ini telah mencapai target sebesar 100 persen.

Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara baik, khususnya dari aspek akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek pengelolaan Barang Milik Daerah serta optimalisasi pendapatan daerah guna memperkuat kualitas tata kelola keuangan secara keseluruhan.

2. Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator pengelolaan BMD, diperoleh capaian sebesar 87,62 persen, yang menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah masih belum optimal.

Meskipun capaian berada pada kategori cukup tinggi, hasil tersebut mengindikasikan masih terdapat kelemahan dalam aspek pengelolaan aset, seperti inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan aset. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi nilai ekonomi aset daerah serta berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024, rasio efektivitas pajak daerah tercatat sebesar 69,36 persen, yang menunjukkan kinerja pemungutan pajak daerah belum efektif dan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Rendahnya rasio efektivitas pajak daerah disebabkan oleh tidak tercapainya target pada beberapa jenis pajak utama, antara lain:

- a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
Realisasi penerimaan hanya sebesar Rp14.737.632.984,00 atau 39,25 persen dari target sebesar Rp37.550.531.253,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh tidak optimalnya kegiatan ekspor pasir kuarsa akibat faktor eksternal, seperti kondisi cuaca serta penurunan harga jual di pasar regional, yang menyebabkan pelaku usaha tidak melaksanakan kegiatan produksi dan ekspor secara maksimal.
- b. Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet
Kedua jenis pajak ini belum memberikan kontribusi penerimaan pada Tahun 2024, yang mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terbatasnya basis pajak, serta belum optimalnya pengawasan dan penagihan.
- c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Realisasi penerimaan sebesar Rp395.216.351,00 atau 26,35 persen dari target, menunjukkan adanya penurunan aktivitas transaksi properti serta kemungkinan adanya faktor administratif dan kepatuhan yang mempengaruhi rendahnya penerimaan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan bahwa aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan baik, namun masih terdapat ketimpangan pada aspek pengelolaan aset dan optimalisasi pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pada sisi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, yang selanjutnya telah disempurnakan melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022. Keberadaan perangkat daerah ini memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah, khususnya dalam menjaga kualitas tata kelola fiskal daerah yang akuntabel dan berkesinambungan.

Dalam konteks pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, paradigma pengelolaan kinerja saat ini telah mengalami pergeseran dari pendekatan berbasis output menuju pendekatan berbasis *outcome* dan *impact*. Pergeseran tersebut menuntut adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang tidak hanya menekankan pada aspek realisasi fisik dan keuangan, tetapi juga pada capaian manfaat yang terukur dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi prasyarat utama dalam mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui kebijakan nasional terus mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, dan terintegrasi, antara lain melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta kebijakan efisiensi belanja negara dan daerah. Kebijakan efisiensi nasional yang diarahkan pada optimalisasi penggunaan anggaran, pengendalian belanja, serta peningkatan kualitas belanja publik, menuntut pemerintah daerah untuk mampu melakukan penyesuaian dalam perencanaan dan penganggaran secara lebih selektif dan berbasis prioritas.

Namun demikian, dalam implementasinya, pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya terkait kesiapan kelembagaan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, serta kapasitas sumber daya manusia. Ketidaksiapan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pemanfaatan SIPD sebagai sistem yang terintegrasi dan komprehensif dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan akuntabel.

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2026 antara lain masih terbatasnya dukungan infrastruktur teknologi informasi, terutama dalam hal stabilitas jaringan data yang belum memadai. Kondisi ini menyebabkan terjadinya gangguan akses terhadap sistem, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kelancaran proses penatausahaan keuangan pada perangkat daerah. Dalam konteks kebijakan efisiensi nasional, kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan anggaran, karena keterbatasan sistem dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan akurasi data keuangan.

Di sisi lain, kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan belanja APBD masih menunjukkan berbagai kelemahan. Hal ini tercermin dari belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti RKA dan DPA, yang belum sepenuhnya disusun secara rinci, terukur, dan berbasis kinerja. Selain itu, masih sering terjadi pergeseran anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, yang mengindikasikan belum optimalnya kualitas perencanaan awal serta belum kuatnya disiplin anggaran. Kondisi ini menjadi semakin krusial dalam situasi efisiensi fiskal, dimana setiap alokasi anggaran dituntut memberikan nilai manfaat yang maksimal (*value for money*).

Dalam praktiknya, peran pejabat pengelola keuangan juga belum berjalan secara optimal, dimana proses penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIPD masih didominasi oleh pelaksana teknis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas dalam fungsi pengendalian dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, khususnya bagi pejabat pengelola keuangan perangkat daerah. Penguatan tersebut mencakup peningkatan pemahaman terhadap regulasi, peningkatan kompetensi teknis dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam perspektif kebijakan efisiensi nasional, upaya penguatan tersebut menjadi sangat penting, mengingat pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga harus mampu menjamin efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola fiskal daerah yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi eksisting, hasil evaluasi kinerja, serta arah kebijakan dalam Renja Tahun 2026, terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna. Isu-isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan, kualitas perencanaan, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan waktu, akurasi data, serta konsistensi pelaksanaan antar perangkat daerah. Meskipun dalam Renja 2026 telah ditargetkan capaian indikator seperti ketepatan waktu penyampaian dokumen anggaran dan laporan keuangan, namun implementasinya masih memerlukan penguatan koordinasi dan integrasi sistem antar SKPD.
2. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan belum sepenuhnya

berjalan optimal dan terintegrasi. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaktepatan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RKA dan DPA, serta perlunya peningkatan kualitas pembinaan kepada perangkat daerah. Dalam Renja 2026, hal ini menjadi fokus melalui kegiatan koordinasi, verifikasi, dan pembinaan penganggaran serta akuntansi keuangan daerah.

3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi SIPD sebagai sistem nasional masih menghadapi kendala, khususnya terkait kesiapan SDM dan kemampuan teknis dalam pengoperasiannya. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, seperti stabilitas jaringan, turut mempengaruhi kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan BMD. Pengelolaan aset daerah masih menghadapi tantangan dalam hal penatausahaan, pengamanan, serta pemanfaatan aset secara optimal. Hal ini memerlukan penguatan sistem pengawasan, pembinaan, serta peningkatan kualitas data aset agar dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang andal.
5. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah. Potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya tergali dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya inovasi dalam penggalan sumber-sumber pendapatan, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah.
6. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah. Pengelolaan pajak daerah masih menghadapi kendala pada aspek perencanaan, pemungutan, dan pengawasan. Diperlukan upaya peningkatan basis data wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.
7. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan agar lebih terukur, konsisten, dan berbasis kinerja. Hal ini

menjadi penting mengingat dalam Renja 2026 telah ditetapkan indikator-indikator kinerja yang menuntut keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program secara efektif.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses perencanaan yang disusun tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi pendekatan partisipatif (*bottom-up planning*). Melalui mekanisme ini, berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui forum perencanaan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dapat diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis guna memastikan keselarasan antara kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, penelaahan terhadap usulan masyarakat memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih inklusif, responsif, serta berbasis pada kebutuhan nyata (*needs-based planning*).

Dalam praktiknya, tidak seluruh usulan program dan kegiatan masyarakat dapat secara langsung diakomodasi oleh setiap perangkat daerah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, termasuk dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna. Sebagai perangkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan, BPKPD tidak melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sektoral, melainkan berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan pendapatan daerah.

Karakteristik tersebut menyebabkan ruang lingkup program dan kegiatan BPKPD lebih berorientasi pada fungsi internal pemerintahan (*internal governance function*), seperti perencanaan dan penganggaran daerah, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban

keuangan, pengelolaan kas daerah, pengamanan dan penatausahaan aset, serta optimalisasi penerimaan daerah. Dengan demikian, secara substantif, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPD tidak secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks pelayanan publik sektoral, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan sosial lainnya.

Meskipun demikian, peran BPKPD tetap memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh perangkat daerah. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan (*governance*), fungsi BPKPD dapat dipandang sebagai *enabling factor* yang memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara tertib, efisien, dan akuntabel.

Lebih lanjut, dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), peran BPKPD menjadi semakin strategis dalam memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, dan hasil yang dicapai (*performance linkage*). Melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan, pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan, BPKPD berkontribusi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas fiskal daerah. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, meskipun usulan program dan kegiatan masyarakat tidak dapat diakomodasi secara langsung dalam Renja BPKPD, namun aspirasi tersebut tetap menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Peran BPKPD dalam hal ini adalah memastikan tersedianya dukungan sistem pengelolaan keuangan yang memadai, sehingga perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik dapat mengakomodasi dan merealisasikan usulan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi BPKPD bersifat tidak langsung (*indirect impact*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjamin keberhasilan pembangunan daerah. Dukungan melalui tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, pengelolaan aset yang tertib dan optimal, serta peningkatan kapasitas pendapatan daerah, merupakan kontribusi strategis yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara optimal dan berkesinambungan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, dilaksanakan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara manual maupun berbasis sistem aplikasi komputer, guna mendukung tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai bagian integral dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2025-2029.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.”***

Visi tersebut mengandung tiga unsur utama yang menjadi arah strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yaitu:

1) Makmur;

Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi; peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan

meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.

2) Berdaya Saing;

Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

3) Berbudaya;

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menetapkan lima misi pembangunan sebagai formulasi strategis yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode Tahun 2025-2029. Penetapan misi tersebut merupakan hasil penjabaran visi ke dalam kerangka operasional yang lebih terstruktur, sehingga dapat menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis dan terarah.

Setiap misi dirancang untuk merepresentasikan dimensi prioritas pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, potensi daerah, serta permasalahan pembangunan yang dihadapi. Dengan demikian, misi pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen dalam memastikan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan implementasi program pembangunan tahunan.

Melalui perumusan misi tersebut, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan tujuan pembangunan daerah, sehingga pencapaian sasaran strategis dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1) Misi 1: *Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.*

Misi ini diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna melalui optimalisasi potensi unggulan daerah sebagai penggerak utama pembangunan. Karakteristik wilayah maritim dengan potensi kelautan yang besar menjadi keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan secara maksimal, didukung oleh penguatan sektor strategis lainnya seperti pariwisata, pertanian, dan perindustrian. Pengelolaan potensi tersebut secara terintegrasi dan berbasis nilai tambah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Misi 2: *Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.*

Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, khususnya antar pulau dan kawasan perbatasan di Kabupaten Natuna. Keterbatasan akses transportasi, belum meratanya infrastruktur dasar, serta lemahnya konektivitas antar kawasan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat pergerakan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur difokuskan pada penguatan konektivitas melalui penyediaan dan peningkatan sarana prasarana transportasi, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta pengembangan moda transportasi laut, termasuk kapal/ferry Ro-Ro untuk mendukung mobilitas orang dan distribusi barang secara reguler antar pulau. Selain itu, percepatan pembangunan juga mencakup

penyediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, serta peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan telekomunikasi hingga ke wilayah terpencil.

Melalui pembangunan infrastruktur yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, diharapkan tercipta konektivitas wilayah yang kuat, peningkatan akses terhadap pusat-pusat ekonomi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Natuna

3) Misi 3: *Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.*

Misi ini diarahkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Natuna yang adaptif, berdaya saing, dan berkarakter dalam menghadapi dinamika globalisasi. Peningkatan kualitas SDM difokuskan pada pengembangan kompetensi, keahlian, serta kapasitas inovatif yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Selain itu, pembangunan manusia tidak hanya menitikberatkan pada aspek kualitas dan daya saing, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai iman dan takwa sebagai landasan moral dalam pembentukan karakter. Dalam kerangka tersebut, pembangunan SDM juga diarahkan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial guna menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan yang holistik tersebut, diharapkan terwujud sumber daya manusia Kabupaten Natuna yang unggul, berintegritas, memiliki ketahanan sosial, serta mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

4) Misi 4: *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.*

Misi ini diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan tata kelola tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan

secara berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna.

Upaya pencapaian misi ini dilakukan melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi publik, penguatan sistem pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan responsivitas dan ketangguhan aparatur dalam memberikan pelayanan. Selain itu, peningkatan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas sumber daya aparatur, serta penataan manajemen kepegawaian berbasis kompetensi menjadi fokus utama dalam mendukung efektivitas birokrasi.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menjawab tantangan geografis Kabupaten Natuna sebagai wilayah kepulauan. Dengan demikian, transformasi digital pemerintahan diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

5) *Misi 5: Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.*

Misi ini diarahkan pada penguatan nilai-nilai keagamaan serta pelestarian budaya Melayu sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah. Nilai religius dan budaya lokal merupakan pilar strategis dalam membentuk karakter masyarakat yang berintegritas, beradab, dan berdaya tahan terhadap dinamika perubahan global.

Upaya yang dilakukan meliputi pengembangan dan pelestarian budaya Melayu secara berkelanjutan guna menjaga identitas, kearifan lokal, serta filosofi hidup masyarakat Natuna agar tetap lestari dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat menjadi potensi strategis yang harus dikelola secara harmonis dalam kehidupan beragama, berkebudayaan, dan bermasyarakat.

Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai toleransi, keselarasan, dan keharmonisan antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi prioritas utama dalam mendukung stabilitas sosial. Hal ini dilaksanakan melalui

internalisasi nilai-nilai budaya nasional dan lokal, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkepribadian dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam misi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berada pada Misi ke-4, yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.”* Misi tersebut menjadi landasan strategis dalam penguatan reformasi birokrasi melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kerangka tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memegang peran kunci dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, yaitu meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Peran ini diwujudkan melalui penguatan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, dan terintegrasi.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berbasis digital. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah secara berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan Jangka Menengah BPKPD

Sejalan dengan arah kebijakan dan kerangka perencanaan strategis, tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah:

“Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel.”

Tujuan tersebut merupakan penjabaran operasional dari misi pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan reformasi birokrasi, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis teknologi. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern (*modern public governance*), pengelolaan keuangan daerah tidak lagi dipandang semata sebagai fungsi administratif, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan yang efektif dan berorientasi hasil (*result-oriented governance*).

Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah mencakup penguatan seluruh siklus manajemen keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Setiap tahapan tersebut dituntut untuk dilaksanakan secara terintegrasi, berbasis kinerja, serta didukung oleh sistem informasi yang andal guna memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan realisasi pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi (*compliance-based approach*), tetapi juga pada pencapaian nilai manfaat yang optimal (*value for money*), yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pelayanan publik, mengingat fungsi keuangan daerah memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien akan berdampak pada peningkatan kualitas belanja daerah, sehingga alokasi sumber daya dapat difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja utama yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, antara lain melalui peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah serta capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Indikator tersebut tidak hanya merepresentasikan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga mencerminkan kualitas sistem pengendalian internal, keandalan pelaporan keuangan, serta efektivitas pengelolaan anggaran secara keseluruhan.

Dalam kerangka tersebut, tujuan ini berfungsi sebagai arah strategis utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tujuan ini menjadi landasan dalam perumusan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan tata kelola keuangan daerah secara komprehensif. Selain itu, tujuan ini juga menjadi instrumen evaluatif dalam mengukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi, baik dalam aspek administratif maupun dalam kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pencapaian tujuan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, tetapi juga mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang adaptif, profesional, dan berbasis kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal dan konsisten. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

3.2.2 Sasaran Jangka Menengah BPKPD

Sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan penjabaran operasional dari tujuan strategis yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2025-2029. Sasaran ini dirumuskan secara terukur dengan mengacu pada indikator kinerja utama yang terdapat dalam dokumen Renstra, sehingga

dapat menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi secara sistematis dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja organisasi, penetapan indikator dan target kinerja dilakukan secara sistematis sejak tahap perencanaan hingga akhir periode pelaksanaan. Indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi yang memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan hasil yang dicapai.

Oleh karena itu, perumusan indikator dan target kinerja harus memenuhi prinsip SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, dan Continuously Improve*). Prinsip tersebut menekankan bahwa indikator harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, realistis untuk dicapai sesuai kapasitas organisasi, relevan dengan tujuan strategis, memiliki batas waktu pencapaian yang terdefinisi, serta memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Dengan penerapan prinsip SMART-C, indikator dan target kinerja diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian sasaran pembangunan, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, peningkatan kinerja organisasi, serta penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, rumusan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.

Sasaran ini merupakan representasi dari tujuan “*Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima*”, yang menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan target yang ditetapkan, nilai IKM diproyeksikan meningkat secara bertahap dari 3,46 pada tahun 2025-2027 menjadi 3,49 pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas

layanan, baik dari aspek kecepatan, kemudahan akses, transparansi, maupun profesionalisme aparatur. Dalam jangka menengah, sasaran ini mengarah pada terciptanya pelayanan publik yang semakin responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah.

Sasaran ini merupakan turunan dari tujuan “*Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel*”, yang berfokus pada peningkatan kualitas kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Indikator yang digunakan adalah Nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Target kinerja menunjukkan peningkatan bertahap dari 81,25 pada tahun 2025 menjadi 81,90 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja perangkat daerah. Dalam jangka menengah, sasaran ini diarahkan untuk memperkuat budaya kinerja berbasis hasil (*performance-based management*) serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sasaran ini merupakan inti dari fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola keuangan daerah. Sasaran ini diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu:

a. Opini Laporan Keuangan (BPK)

Target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten selama periode 2025-2030. Hal ini menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai.

b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target menunjukkan peningkatan bertahap dari 2,30% pada tahun 2025 menjadi 2,55% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan upaya optimalisasi potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, serta penguatan sistem pemungutan dan pengawasan.

c. Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)

Target indeks berada pada nilai 3 (kategori baik) pada tahun 2025-2029 dan meningkat menjadi 4 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah, baik dari aspek penatausahaan, pengamanan, maupun pemanfaatan aset untuk mendukung efisiensi dan peningkatan nilai ekonomi daerah.

Secara jangka menengah, sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah (*value for money*) serta mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disusun secara terintegrasi sebagai bagian dari perencanaan berbasis kinerja. Hubungan tersebut menggambarkan kesinambungan antara arah kebijakan, capaian yang ingin diwujudkan, alat ukur kinerja, serta target yang ditetapkan dalam periode perencanaan.

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terukur, keterkaitan tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2030

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,46	3,46	3,47	3,48	3,49
2.	Meningkatnya birokrasi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	81,25	81,25	81,50	81,75	81,85	81,90
3.	Meningkatkan Kualitas Pegnelolaan Keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	▪ Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			▪ Rasio Pertumbuhan PAD. (%)	2,30	2,35	2,35	2,45	2,50	2,55
			▪ Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) (%)	3	3	3	3	3	4

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang mencerminkan tingkat pencapaian tujuan pembangunan perangkat daerah yang diwujudkan melalui hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam kerangka perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*), sasaran memiliki peran strategis sebagai jembatan antara tujuan yang bersifat konseptual dengan implementasi program dan kegiatan yang bersifat operasional. Oleh karena itu, penetapan sasaran dilakukan secara sistematis, terukur, dan berbasis pada analisis kinerja, sehingga mampu memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026, perumusan sasaran mempertimbangkan berbagai aspek strategis, antara lain dinamika pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, evaluasi capaian kinerja, perubahan kebijakan fiskal daerah, serta keterbatasan kapasitas keuangan daerah. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan bersifat realistis, adaptif, dan relevan terhadap kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, indikator dan target kinerja dirumuskan secara jelas dan terstruktur sejak tahap perencanaan hingga evaluasi akhir, dengan mengacu pada prinsip SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, dan Continuously Improve*). Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menjamin keterukuran kinerja secara objektif, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan melalui mekanisme evaluasi yang sistematis.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Renstra Tahun 2025–2029. Secara substantif, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan

dalam Renja telah diselaraskan dengan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target pendanaan yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga tercipta konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Dalam Renstra BPKPD Tahun 2025-2029 ditegaskan bahwa arah kebijakan utama adalah *“Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel”*. Arah kebijakan tersebut diukur melalui indikator utama, antara lain Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam Renja Tahun 2026, indikator tersebut diturunkan ke dalam target kinerja tahunan yang lebih operasional, seperti peningkatan ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta penguatan pengelolaan pendapatan dan aset daerah.

Dengan demikian, sasaran yang dirumuskan dalam Renja Tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah.

4.2 Rincian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Rincian anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari proses perencanaan yang terintegrasi antara aspek kinerja dan penganggaran. Penyusunan anggaran ini mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi anggaran dalam Renja Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan anggaran juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dinamika pelaksanaan anggaran berjalan, serta kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target capaian yang terukur, sehingga terdapat keterkaitan yang jelas antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan output dan outcome yang diharapkan. Pendekatan ini sejalan dengan penerapan *performance-based budgeting*, dimana penganggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian kinerja yang memberikan nilai manfaat (*value for money*).

Rincian anggaran tersebut mencakup seluruh program utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, antara lain Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Masing-masing program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai dengan nomenklatur yang berlaku dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, pengalokasian anggaran juga memperhatikan prinsip efisiensi belanja, penajaman prioritas, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Hal ini menjadi penting dalam rangka menjaga stabilitas fiskal daerah serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Dengan demikian, rincian anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renja Tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah secara terukur, terencana, dan berorientasi pada hasil. Penyajian rincian anggaran secara lengkap selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Renja SKPD BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						141.082.776.644,00								198.858.595.500,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						141.075.571.644,00								198.807.095.500,00	
	5.02	KEUANGAN						141.075.571.644,00								198.807.095.500,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	11.553.110.243,00						-		18.457.700.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	46.374.200,00						-		139.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			69.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	46.374.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-			75 Orang	8.664.033.843,00						-		14.196.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				75 Orang/bulan	8.664.033.843,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			14.196.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00						-		225.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				77 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan sarana administrasi umum perangkat daerah	-			75 Persen	472.713.700,00			-	-	-		1.131.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	34.999.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		103.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		133.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	80.390.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	64.536.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	242.788.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		535.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	117.531.000,00			-	-	-	-	998.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		626.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	117.531.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		215.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		157.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	-			12 Bulan	2.152.100.000,00			-	-	-	-	1.169.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	585.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		214.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1.560.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		945.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			1 Tahun	100.357.500,00			-	-	-	-	597.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya				0 Unit	100.357.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		172.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		225.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	undefined	-			undefined	128.783.524.101,00						-	178.342.335.500,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-			2 Dokumen	1.225.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	-	-	1.777.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	-	-	340.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia	-		709.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia	-		244.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0011		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				10 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia	-		384.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0013		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				0 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah</i>	-			12 ddDokumen	309.978.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	800.001.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				1 Dokumen	109.997.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		225.945.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	99.986.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		306.155.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	99.994.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		199.901.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0011		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				47 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	-		68.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu dan sesuai SAP	-			1 Dokumen	380.422.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	869.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	105.008.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		218.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		179.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				0 Laporan	113.855.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		101.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	131.138.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				1 Dokumen	21.702.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>				0 Dokumen	8.717.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	126.868.123.201,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	174.895.234.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				4 Laporan	110.579.887.501,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		161.888.234.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				4 Laporan	11.288.235.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-		3.507.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	310.010.700,00						-	1.159.060.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan petunjuk dan teknis</i>	-			2 Dokumen	310.010.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.159.060.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	30.019.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		298.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		77.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-		68.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	49.991.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		175.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		193.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		41.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				0 Dokumen	79.994.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		106.310.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.0011		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				4 Laporan	150.005.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		198.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	428.926.600,00						-	848.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan penerimaan Pajak Daerah	-			12 Laporan	428.926.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	848.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		240.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	109.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		195.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				45000 Dokumen	100.002.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		157.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1365 Dokumen	129.957.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	39.027.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	X	NON URUSAN						7.205.000,00							51.500.000,00		
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.205.000,00							51.500.000,00		
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.205.000,00						-	51.500.000,00		
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran</i>	-			1 Tahun	7.205.000,00			-	-	-	-	51.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				0 Unit	7.205.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
J U M L A H									141.082.776.644,00							198.858.595.500,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dengan tetap memperhatikan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan pembangunan daerah, serta kondisi fiskal daerah yang berkembang.

Renja ini memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif yang disusun secara terukur dan sistematis, dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui Renja ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara optimal, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah. Penyesuaian yang dilakukan tidak hanya diarahkan pada peningkatan serapan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan manfaat bagi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

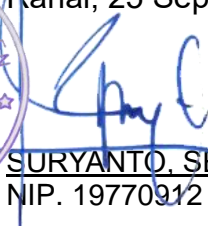
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan proses bisnis, serta penguatan sistem informasi menjadi faktor kunci dalam

mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja, khususnya dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.



Ranai, 25 September 2025


SURYANTO, SE., MA
NIP. 19770912 200012 1 004